

**LAPORAN RAKOR PENGENDALIAN TINGKAT OPD
PELAKSANAAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022
BULAN DESEMBER DI OPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

I. DESKRIPSI PENYELENGGARAAN RAKOR

A. Waktu Penyelenggaraan Rakor

Jumat, 30 Desember 2022

B. Pimpinan Rakor

Kepala Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah

C. Peserta Rakor

1. Sekretaris
2. Kepala Bidang/Pejabat eselon III
3. Kepala Sub Bagian/Eselon IV dan Pejabat Fungsional
4. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Gaji
5. Bendahara Pengeluaran Pembantu
6. Pelaksana di masing-masing unit kerja

D. Notulis

Sub Bagian Program

II. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN BULAN INI

A. Realisasi sampai dengan bulan ini

- a. Fisik = 100 %
- b. Keuangan = 20.202.033.061 (97,37%)

B. Kegiatan yang berdeviasi fisik

No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi		Deviasi Fisik (%)	Ket
				Fisik (%)	Keuangan (Rp)		
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan							
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN							
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi							
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	0			0		
1	Monev Kegiatan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Proses Pengambilan Keputusan	0	100	0	0	(100)	
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN							
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi							

	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	0				0	
1	Rapat persiapan Kegiatan pelatihan Manajemen Kasus bagi SDM UPTD PPA	0	100	0		0	(100)
2	Pelaksanaan Kegiatan pelatihan Manajemen Kasus bagi SDM UPTD PPA	0	100	0		0	(100)
3	Pelaporan Kegiatan pelatihan Manajemen Kasus bagi SDM UPTD PPA	0	100	0		0	(100) -
Jumlah SSK dengan Deviasi Fisik Negatif s/d Bulan ini :		4	0	0			
Jumlah SSK dengan Anggaran yang di 0 kan :		5	0	0			

III. PERMASALAHAN DAN HAMBATAN SERTA UPAYA PENYELESAIANNYA

Permasalahan

1. Angka DO KB semakin meningkat
2. Rasio PLKB tidak Proporsional
3. Sampai saat ini layanan puspa di Kabupaten/Kota berdasarkan SK Kepala Daerah dan Kepala Dinas sejumlah 23 Kabupaten/Kota (yang aktif maupun tidak)
4. Masih terdapat 2 kab/kota yang menurun predikatnya
5. masih tingginya korban kekerasan KDRT terhadap perempuan
6. banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di ruang-ruang publik
7. masih banyak kasus kekerasan terhadap anak utamanya Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)
8. Belum semua Kab/Kota menyusun GDPK 5 Pilar
9. Pembinaan Provinsi masih terbatas pada kelompok tribina di desa binaan OPD
10. Kurangnya pemahaman PUS baru terkait pentingnya penggunaan kontrasepsi

Upaya

1. Safari KB, Penggerakan KB bersama Mitra
2. Pengoptimalan peran mitra kerja melalui penggerakan dan Bakti Sosial pelayanan KB
3. Sosialisasi peningkatan KLA
4. sosialisasi secara masif kepada masyarakat
5. pencegahan melalui kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak dengan melibatkan unsur pentahelix.
6. Mengadvokasi kab/kota untuk menyusun GDPK 5 pilar
7. Pembinaan Provinsi akan dilakukan setidaknya 1 kelompok Tribina per kab/kota atau dilakukan rakor di Kabupaten/Kota

IV. RENCANA KERJA BULAN BERJALAN

-

V. PENUTUP

Stressing Pengendalian :

1. Para Kabid/Kasubag/Sub Koordinator pada masing-masing bidang/seksi selalu mengontrol dan memperhatikan target kinerja baik fisik maupun keuangan serta realisasinya;
2. Apabila target kinerja fisik maupun keuangan belum bisa terpenuhi, dimohon untuk menjelaskan permasalahan dan upaya pemecahannya dalam narasi yang singkat dan jelas;
3. Para Pejabat eselon 3 dan 4 serta sub koordinator masing-masing Bidang/Seksi, agar memperhatikan capaian target kinerja mulai dari indikator tujuan, sasaran, kegiatan, sub kegiatan sampai dengan sub sub kegiatan;
4. Masing-masing unit kerja/pemilik resiko pada bidang dan sekretariat, agar memperhatikan manajemen resiko yang sudah dibuat dan menjalankan rencana tindak pengendaliannya secara optimal;
5. Pencapaian target-target indikator dalam RPJMD dan RKPD harus semaksimal mungkin karena sudah memasuki tahap akhir pelaksanaan RPJMD;
6. Dimohon masing-masing bidang/seksi dan sekretariat mencermati kembali Rancangan kegiatan (target dan sasaran) dengan memperhatikan isu prioritas (nasional dan provinsi) serta isu strategis lainnya;
7. SPSE pengadaan langsung maupun tidak langsung dan PD3N Siera harus diinput setiap bulan;
8. Pengadaan barang/jasa dibawah 200 juta harus diupayakan melalui E-Blangkon (mamin dan ATK).


Capaian realisasi fisik dan keuangan Dinas Perempuan dan Anak sampai dengan bulan Desember 2022, sebagai berikut:

No	Unit Kerja	Target Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan (%)	Deviasi Fisik (%)
1	Dinas Perempuan dan Anak	100	100	97.37	(2.63)
2	Sekretariat	100	100	97.28	(2.72)
3	Bidang KHPP	100	100	95.83	(4.17)
4	Bidang PHPA	100	100	98.02	(1.98)
5	Bidang KB KIE	100	100	99.97	(0.03)
6	Bidang DALDUK KS	100	100	99.36	(0.64)
7	Bidang Data Parmas	100	100	99.55	(0.45)

Demikian laporan pelaksanaan rapat koordinasi pengendalian pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah bulan Desember 2022, untuk menjadikan periksa.

Semarang, Jumat, 30 Desember 2022

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA


Dra. RETNO SUDEWI, Apt.MSi,MM

NIP. 196811241993102001